



Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Anggaran Belanja Modal

Agus Sukarno^{1*}, Hadioetomo², Agus Haryadi³

^{1,2,3}UPN Veteran Yogyakarta, I. SWK Jl. Ring Road Utara, Sleman, Yogyakarta

DOI: <http://dx.doi.org/10.30587/jiatax.v2i1.1044>

Abstrak

Regional Autonomy intended that each region can be independent in conducting regional development in the form of capital cost in order to increase the area of fixed assets. The purpose of this study is to determine whether there is the influence of the Economic Growth, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Original Income Area, SiLPA, and Total Area against Capital Expenditure of the District/City in Indonesia. This study used secondary data obtained from the Supreme Audit Agency in 2017. The sample used in the study were 180 District/City located in Indonesia. The way to analyze the data by using multiple linier regression analysis. Based on the analysis stated that the variable Revenue Sharing Fund, Original Income Area, Total Area effect on Capital Expenditure. While Economic Growth, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, SiLPA does not effect on Captital Expenditure.

Jenis artikel: Empiris

Keywords: *Economic Growth, General Allocation Fund, Spesial Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Original Income Area, SiLPA, Total Area, Capital Expenditure.*

1. Pendahuluan

Reformasi pada tahun 1998 menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Perubahan tersebut juga berdampak dalam pemerintahan di Indonesia, dengan berubahnya bentuk pemerintahan dari sentralisasi menjadi struktur desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari

* Penulis yang sesuai:

E-mail: karno_upn@yahoo.co.id

Afiliasi: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah Kabupaten dan Kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Sumber pembiayaan yang penting untuk Pemda adalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penerimaan daerah yang sangat penting untuk membantu laju pembangunan daerah. Adanya PAD dijadikan sebagai modal untuk membiayai belanja di daerah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar akan memperkecil sumber pembiayaan dari Pemerintah pusat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperbaiki pembiayaan daerah. Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan kesenjangan keuangan yang dapat menimbulkan kesenjangan antar daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah yaitu dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian akan terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana ini untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer Pemerintah Pusat kepada daerah terdiri dari 2 jenis yaitu, DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Selain dari PAD dan dana perimbangan, Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya untuk membiayai kegiatannya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa lebih pembiayaan anggaran untuk keperluan yang tidak jelas dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. SiLPA juga merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Dalam penjelasan Undang-

Undang No. 33 Tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Luas wilayah menurut Ardhini (2011) dalam Edy dkk. (2015) adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Daerah dengan luas wilayah yang lebih luas akan membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik dibandingkan dengan daerah yang memiliki wilayah yang tidak begitu luas.

2. Tinjauan Pustaka dan Hipotesis

2.1. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PE) Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal*

Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah. Pemerintah Daerah akan terus meningkatkan alokasi anggaran belanja modal setiap tahunnya guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana (Farah dan Cahyo, 2010).

Irfan dkk. (2015) menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan Ekonomi akan dapat meningkat apabila di ikuti dengan bertambahnya infrastruktur dan sarana prasarana suatu daerah. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis untuk penelitian ini adalah :

H₁ : Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.

2.2. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal*

Dana Alokasi Umum merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) yang diberikan kepada semua Kabupaten atau Kota. Hal ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan di distribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya Oktora dan Pontoh (2013) dalam Arif (2014).

Berdasarkan penelitian Irfan dkk. (2015) dan Ainun (2014) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Dana Aloksi Umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal disebabkan karena adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis untuk penelitian ini adalah :

H₂ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.

2.3. *Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal*

Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang

merupakan urusan daerah dan prioritas nasional Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah (Arbie, 2012).

Arbie (2012) menyatakan bahwa Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang.

Irfan dkk. (2015) dan Arbie (2012) menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Dana Alokasi Khusus dapat digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui anggaran belanja modal. Dari uraian diatas, hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H₃ : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.

2.4. *Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal*

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari dana perimbangan untuk mengatasi ketimpangan vertikal yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan nasional, dan penerimaan sumber daya (Irfan dkk., 2015).

Secara teoritis Pemerintah Daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun sebaliknya semakin kecil belanja modal yang ditetapkan, jika anggaran DBH semakin kecil (Arbie, 2012).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Irfan dkk. (2015) dan Arbie (2012) Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini mengindikasikan bahwa Kabupaten/Kota yang mendapatkan DBH yang besar cenderung akan memiliki belanja modal yang besar pula. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis untuk penelitian ini adalah :

H₄ : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.

2.5. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan bagi Pemerintah Daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD masing-masing dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki (Arbie, 2012). Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Peningkatan belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada akhirnya mampu meningkatkan partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Fitria, 2013).

Kusanandar dan Siswantoro (2012) menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu faktor penentu dalam menentukan alokasi anggaran belanja modal. Dari uraian di atas, hipotesis untuk penelitian ini adalah :

H₅ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.

2.6. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal

SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Kusnandar dan Siswanto, 2012).

SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, kemudian untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung meliputi belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai serta SiLPA juga digunakan untuk mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan (Arif, 2014).

Kusnandar dan Siswanto (2012) menemukan bahwa SiLPA berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal, hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA tahun sebelumnya sangat berpengaruh pada alokasi belanja tahun berikutnya. Dari uraian diatas, hipotesis untuk penelitian ini adalah :

H₆ : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.

2.7. Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Luas tidaknya suatu daerah yang akan mempengaruhi besarnya alokasi anggaran belanja modal (Ainun, 2014).

Semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak sarana dan prasarana yang harus disediakan Pemerintah Daerah agar tersedia pelayanan kepada publik, sehingga pengalokasian anggaran belanja modal menjadi tinggi untuk menyediakan sarana dan prasarana tersebut (Edy dkk., 2015).

Ainun (2014) menemukan bahwa Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Dari uraian diatas, hipotesis untuk penelitian ini adalah :

H₇ : Luas Wilayah berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.

3. Metode Penelitian

3.1. Populasi Penelitian dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2013. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 511 yang terdiri dari 413 Kabupaten dan 98 Kota. Pemilihan sampel dilakukan melalui pendekatan *non probability sampling* dengan cara *purposive sampling* atau pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 180 Kabupaten/Kota di Indonesia.

3.2. Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRB } t - \text{PDRB } t-1)}{\text{PDRB } t-1} \times 100 \%$$

Keterangan :

$$\begin{aligned} \text{PDRB } t &= \text{PDRB pada satu tahun} \\ \text{PDRB } t-1 &= \text{PDRB pada satu tahun sebelumnya} \end{aligned}$$

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU baik daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal, dimana Celah Fiskal dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan Laporan Realisasi APBD. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

4. Dana Bagi Hasil (DBH)

Variabel DBH dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{DBH} = \text{Bagi Hasil Pajak} + \text{Bukan Pajak}$$

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variabel PAD dapat diukur dengan rumus :

$$\text{PAD} = \text{Pendapatan Pajak Daerah (PPD)} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-Lain Pendapatan yang Sah.}$$

6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Penghitungan SiLPA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{SiLPA} = \text{Surplus / Defisit Realisasi Anggaran} + \text{Pembiayaan Neto}$$

7. Luas Wilayah

Luas Wilayah dapat diukur dengan melihat berapa Luas Wilayah daerah tersebut.

8. Belanja Modal (BM)

Indikator variabel belanja modal diukur dengan rumus :

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya}$$

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2013 (LHP-BPK 2013). Data yang dianalisis dalam penelitian ini berupa laporan keuangan Kabupaten/Kota di Indonesia yang berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan APBD. Data Pertumbuhan Ekonomi (PDRB atas harga konstan 2000), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, PAD, dan SiLPA menggunakan data Realisasi Anggaran APBD tahun 2013. Data Luas Wilayah bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang diunduh melalui situs web resmi Kementerian Dalam Negeri yang beralamat di www.kemendagri.go.id.

3.4. Teknik dan Metode Analisis Data

Penelitian menggunakan pendekatan analisis kuantitatif, alat yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software Statistical Product and Service Solution (SPSS)*. Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$BM_{t+1} = \alpha + \beta_1 PE_t + \beta_2 DAU_t + \beta_3 DAK_t + \beta_4 DBH_t + \beta_5 PAD_t + \beta_6 SiLPA_t + \beta_7 Luas_t + e$$

Keterangan :

α	= Konstanta
β_i	= Intersep/slope/koeffisien regresi
BM	= Belanja Modal
PE	= Pertumbuhan Ekonomi
DAU	= Dana Alokasi Umum
DAK	= Dana Alokasi Khusus
DBH	= Dana Bagi Hasil
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
SiLPA	= Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Luas	= Luas Wilayah
t	= Periode
e	= Error

Tahap – tahap yang terdapat dalam metode analisis data adalah sebagai berikut :

3.4.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif terdiri dari perhitungan mean, median, standar deviasi, maksimum dan minimum masing-masing data sampel Ghazali (2011).

3.4.2. Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak (*fit*) untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Kriteria pengambil keputusan seperti berikut :

- a) Jika signifikansi > 0,05 model regresi dalam penelitian ini tidak layak untuk digunakan dalam penelitian.
- b) Jika signifikansi < 0,05 model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam penelitian.

3.4.3. Uji Statistik t

Uji statistik t yaitu pengujian koefisien regresi secara parsial dengan menentukan formula statistik yang akan diuji. Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambil keputusan seperti berikut (Ghozali, 2011) :

- a) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen secara parsial signifikan mempengaruhi variabel dependen.

- b) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel independen secara parsial tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

3.4.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk (R^2) yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Jika dalam suatu model terdapat lebih dari satu variabel independen, maka lebih baik menggunakan nilai *adjusted* R^2 (Ghozali, 2011).

3.4.5. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik meliputi sebagai berikut :

3.4.5.1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah distribusi secara normal (Ghozali, 2011). Uji normalitas ini perlu dilakukan untuk menentukan alat statistik yang dilakukan sehingga kesimpulan yang diamati dapat dipertanggungjawabkan. Alat uji normalitas yang digunakan adalah *one sample Kolmogorov-Smirnov*. Residual dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi variabel dependen memiliki nilai signifikansi lebih dari 5%.

3.4.5.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan dari varians dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan Heteroskedastisitas (Ainun, 2014). Sebuah model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai data yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data *cross section* mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran yaitu kecil, sedang, atau besar (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dalam model, peneliti akan menggunakan Uji Glejser dengan bantuan program SPSS. Apabila koefisien parameter beta > 0.05 maka tidak ada masalah Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

3.4.5.3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ainun, 2014). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data *cross section* (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011). Uji autokorelasi dalam penelitian ini adalah uji *Durbin-Watson* (DW). Uji *Durbin-Watson* hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first*

order autocorrelation) dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah (Ghozali, 2011) :

H_0 : Tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_a : Ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2011) :

Tabel 1
Uji Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negative	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

3.4.5.4. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara independen. Jika variabel independen saling korelasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model, peneliti akan melihat *Tolerance* dan *Variance Inflation Factors* (VIF) dengan alat bantu SPSS. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$. Bila ternyata dalam model terdapat multikolinieritas, peneliti akan mengatasi hal tersebut dengan transformasi variabel. Transformasi variabel merupakan salah satu cara mengurangi hubungan linier diantara variabel independen. Transformasi dapat dilakukan dalam bentuk logaritma natural dan bentuk *first difference* atau delta (Ghozali, 2011).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki nilai minimum -5,81, nilai maksimum 12,86, rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 5,8551 dan standar deviasi sebesar 2,24652 dengan jumlah sampel sebanyak 180.
2. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum 194.579, nilai maksimum 1.730.063, rata-rata Dana Alokasi Umum 600.572.928 dan standar deviasi sebesar 257.311 dengan jumlah sampel sebanyak 180.
3. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai minimum 1.376, nilai maksimum 181.490, rata-rata Dana Alokasi Khusus (DAK) 58.162.021 dan standar deviasi sebesar 297.150 dengan jumlah sampel sebanyak 180.
4. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai minimum 5.163, nilai maksimum 1.478.559, rata-rata Dana Bagi Hasil (DBH) 123.062,94 dan standar deviasi sebesar 211.745 dengan jumlah sampel sebanyak 180.
5. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum 5.120, nilai maksimum 2.791.580, rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) 132.770,21 dan standar deviasi sebesar 262.581 dengan jumlah sampel sebanyak 180.
6. Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) memiliki nilai minimum -5.268, nilai maksimum 1.506.671, rata-rata Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 164.316,72 dan standar deviasi sebesar 230.982 dengan jumlah sampel sebanyak 180.
7. Variabel Luas Wilayah memiliki nilai minimum 16,06, nilai maksimum 42.620,70, rata-rata Luas Wilayah 3.102,4956 dan standar deviasi sebesar 4.521,98 dengan jumlah sampel sebanyak 180.
8. Variabel Belanja Modal (BM) memiliki nilai minimum 62.345, nilai maksimum 1.281.394, rata-rata Belanja Modal 247.537,25 dan standar deviasi sebesar 1.982,63 dengan jumlah sampel sebanyak 18.

Tabel 2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PE	180	-5,81	12,86	5,8551	2,24652
DAU	180	194579	1730063	600572928	257311
DAK	180	1376	181490	58162021	29715
DBH	180	5163	147855	12306294	211745
PAD	180	5120	2791580	132770216	262581
SILPA	180	-5268	1506671	164316721	230982
LUAS	180	16,06	42620,70	3102,4956	4521,98
BM	180	62345	1281394	247537252	198263
Valid N (listwise)	180				

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Normalitas

Tabel 3
Uji Normalitas dengan *One Sample Kolmogorov Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		180
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,14435812
Most Extreme Differences	Absolute	,034
	Positive	,034
	Negative	-,029
Kolmogorov-Smirnov Z		,451
Asymp. Sig. (2-tailed)		,987

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan hasil uji *One-Sample Kolmogorov Smirnov* yang tersaji diatas, menunjukkan bahwa data penelitian telah terdistribusi normal yang dibuktikan dengan *asymp. Sig* sebesar 0,987 yang lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 0,05. Oleh karena data telah terdistribusi normal, maka data dapat digunakan dalam pengujian dengan model regresi berganda.

4.2.2. Uji Autokorelasi

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,478 ^a	,228	,196	67508852166,38830	1,755

a. Predictors: (Constant), Ln_Luas, Ln_DAU, Ln_PE, Ln_SILPA, Ln_DBH, Ln_DAK, Ln_PAD

b. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Dari hasil uji *Durbin-Watson* pada Tabel 4 diatas, diperoleh nilai DW sebesar 1,755. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 0,05 (5%), jumlah sampel 180 dan jumlah variabel independen 7 (k=7). Dari tabel *Durbin-Watson* didapat nilai batas atas (du) 1,825, nilai batas bawah (dl) 1,68779. Oleh karena itu, nilai DW lebih besar dari nilai batas bawah (dl) dan lebih kecil dari 4-du ($1,687 < 1,755 < 1,825$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif.

4.2.3. Uji Multikolinieritas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Ln_PE	,977	1,023
Ln_DAU	,360	2,779
Ln_DAK	,538	1,860
Ln_DBH	,474	2,111
Ln_PAD	,266	3,756
Ln_SILPA	,583	1,717
Ln_Luas	,548	1,826

a. Dependent Variable: Ln_BM

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Dari hasil pengujian pada Tabel 5 diatas, dapat dilihat bahwa angka *tolerance* PE, DAU, DAK, DBH, PAD, SILPA dan Luas Wilayah > 0,10 dan VIF-nya < 10. Hasil perhitungan nilai *tolerance* juga menunjukkan tidak ada variabel independen memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10. Ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel independen dalam penelitian.

4.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas sebelum transformasi dengan Logaritma Natural

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	25930150962,006	19479176258,369		1,331	,185
PE	1564687151,400	2223948097,381	,047	,704	,483
DAU	,011	,027	,037	,400	,690

DAK	-,086	,222	-,034	-,386	,700
DBH	,190	,037	,540	5,205	,000
PAD	,066	,025	,230	2,651	,009
SILPA	-,032	,037	-,099	-,863	,390
LUAS	-721878,424	1310805,092	-,044	-,551	,583

a. Dependent Variable: ABS_RES

Dari hasil regresi pada tabel 6 menunjukkan bahwa ada variabel independen yang memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (5%) yaitu variabel DBH dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan variabel PAD dengan nilai signifikansi sebesar 0,009. Maka dapat disimpulkan telah terjadi heteroskedastisitas. Untuk memperbaiki hasil tersebut, peneliti melakukan transformasi seluruh variabel independen ke dalam fungsi Logaritma Natural (Ln) dan mengubah fungsi variabel dependen dari Abs_Res (Absolute Residual) ke dalam fungsi Unstandardized Residual

Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas setelah transformasi dengan Logaritma Natural

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,155	,949		,164	,870
Ln_PE	-,010	,024	-,033	-,425	,671
Ln_DAU	-,018	,046	-,050	-,396	,693
Ln_DAK	-,001	,019	-,006	-,059	,953
Ln_DBH	,012	,016	,087	,785	,433
Ln_PAD	,014	,019	,106	,721	,472
Ln_SILPA	-,014	,012	-,118	-1,181	,239
Ln_Luas	,012	,010	,122	1,186	,237

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Dilihat dari hasil regresi pada Tabel 7 yang menunjukkan dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan sudah tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

4.2.5. Analisis Regresi Berganda

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Berganda

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Signifikansi pada $\alpha = 5\%$

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,927	2,396		4,143	,000
Ln_PE	,065	,060	,054	1,093	,276
Ln_DAU	,085	,117	,059	,722	,472
Ln_DAK	,065	,048	,092	1,374	,171
Ln_DBH	,248	,040	,442	6,198	,000
Ln_PAD	,197	,049	,383	4,028	,000
Ln_SILPA	,012	,030	,026	,403	,688
Ln_Luas	,100	,025	,261	3,934	,000

a. Dependent Variable: Ln_BM

Model regresi dalam penelitian ini telah diubah menjadi model Logaritma Natural, sehingga beta dan koefisien dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam bentuk Logaritma Natural.

Dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan persamaan model regresi sebagai berikut :

$$BM_{t+1} = \alpha + \beta_1 PE_t + \beta_2 DAU_t + \beta_3 DAK_t + \beta_4 DBH_t + \beta_5 PAD_t + \beta_6 SiLPA_t + \beta_7 Luas_t + e$$

Dengan melakukan analisis model regresi dan hasil regresi linier berganda maka diperoleh persamaan Pertumbuhan Ekonomi (PE), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Luas Wilayah yang mempengaruhi anggaran alokasi Belanja Modal (BM) sebagai berikut :

$$LnBM_{t+1} = 9,927 + 0,065 LnPE_t + 0,085 LnDAU_t + 0,065 LnDAK_t + 0,248 LnDBH_t + 0,197 LnPAD_t + 0,012 LnSiLPA_t + 0,100 LnLuas_t$$

Dalam persamaan regresi di atas, konstanta atau α adalah sebesar 9,927. Menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen, variabel Belanja Modal dipengaruhi sebesar 9,927. Hasil uji regresi linier berganda untuk variabel independen dijelaskan sebagai berikut :

1. $\beta = 0,065$
Nilai koefisien regresi untuk variabel Ln_PE sebesar 0,065.
2. $\beta = 0,085$
Nilai koefisien regresi untuk variabel Ln_DAU sebesar 0,085.
3. $\beta = 0,065$
Nilai koefisien regresi untuk variabel Ln_DAK sebesar 0,065.
4. $\beta = 0,248$
Nilai koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap variabel Ln_DBH meningkat 1%, maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,248% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan.
5. $\beta = 0,197$
Nilai koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap variabel Ln_PAD meningkat 1%, maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,197% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan.

6. $\beta = 0,012$
Nilai koefisien regresi untuk variabel Ln_SiLPA sebesar 0,012.
7. $\beta = 0,100$
Nilai koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap variabel Ln_Luas meningkat 1%, maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,100% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan.

4.2.6. Uji Statistik F

Tabel 9
Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	33,283	7	4,755	35,330	,000 ^b
Residual	22,610	168	,135		
Total	55,893	175			

- a. Dependent Variable: Ln_BM
- b. Predictors: (Constant), Ln_Luas, Ln_DAU, Ln_PE, Ln_SILPA, Ln_DBH, Ln_DAK, Ln_PAD

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 35,330 dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model regresi layak (*fit*).

4.2.7. Uji Statistik t

Hasil pengujian data seperti tersaji pada Tabel 8 mengindikasikan bahwa variabel independen Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Luas Wilayah yang berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal dengan nilai signifikansi masing-masing variabel sebesar 0,000. Untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal, dengan nilai *sig.* sebesar 0,276 untuk Pertumbuhan Ekonomi (PE), 0,472 Dana Alokasi Umum (DAU), 0,171 Dana Alokasi Khusus (DAK), 0,688 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

4.2.8. Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,772 ^a	,595	,579	,36685

- a. Predictors: (Constant), Ln_Luas, Ln_DAU, Ln_PE, Ln_SILPA, Ln_DBH, Ln_DAK, Ln_PAD
- b. Dependent Variable: Ln_BM

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Koefisien determinasi menunjukkan kuat atau lemahnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada Tabel 10 dapat diketahui koefisien determinasi sebesar 0,579 dapat disimpulkan bahwa 57,90% variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh 7 variabel independen, sedangkan sisanya 42,10% dipengaruhi oleh variabel lain dan sebab-sebab lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. *Standart Error of The Estimate (SEE)* sebesar 0,36685, semakin kecil SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi (PE) tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Indonesia.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Indonesia.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Indonesia.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Indonesia.
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Indonesia.
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Indonesia.
7. Luas Wilayah berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Indonesia.

5.1. Keterbatasan

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan periode penelitian satu tahun, hanya pada tahun anggaran 2017 sehingga tidak dapat diketahui kecenderungan antar waktu.
2. Penelitian ini hanya mengambil 7 (tujuh) variabel independen sehingga hasil penelitian ini belum dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal.

5.2. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, adapun saran-saran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Melihat adanya fenomena Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal, sebaiknya Pemerintah Daerah lebih memperhatikan proporsi Dana Alokasi Umum yang dialokasikan ke Belanja Modal, tetapi yang terjadi Dana Alokasi Umum lebih besar digunakan untuk belanja pegawai. Pemerintah Daerah seharusnya juga lebih meningkatkan proporsi Dana

Alokasi Khusus yang lebih besar dari yang ada saat ini karena Dana Alokasi Khusus salah satunya digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggunakan DAU, DAK, DBH, PAD, SILPA dengan sebaik-baiknya dengan cara mengoptimalkan kinerja keuangan yang ada, ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat untuk memajukan perekonomian setiap Kabupaten/Kota di Indonesia.

2. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data LKPD yang terbaru dengan pengamatan penelitian lebih dari satu tahun sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih terkini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal. Data PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2018 yang terbaru dapat diperoleh melalui situs www.bps.go.id.
3. Bagi penelitian selanjutnya untuk pengembangan teori, sebaiknya menambahkan variabel baru yang berkaitan dengan belanja modal seperti variabel Jumlah Penduduk (Andri dkk., 2014). Jumlah penduduk yang besar dapat meningkatkan pendapatan daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah, dengan meningkatnya pajak daerah dan retribusi daerah maka alokasi anggaran Belanja Modal akan ikut meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwanto & Yustikasari, Yulia. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Devita, Andri., Arman Denis & Junaidi. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. Jurnal. Universitas Jambi, Jambi.
- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivarite Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jariyah, Ainun. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, PAD, SiLPA, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah*. Jurnal Akuntansi. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Kusnandar & Dodik Siswanto. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Jurnal Akuntansi. Universitas Indonesia.
- Meianto, Edy., Betry, & Cherrya Dhia Wenny. 2015. *Pengaruh DAU, DAK, PAD, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan*. Jurnal Akuntansi. STIE Multi Data, Palembang.
- Pangestu, Irfan., Rina Arifati, & Abrar Oemar. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Seluruh Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2009- 2013*. Jurnal Akuntansi. Universitas Pandanaran, Semarang.

- Purnama, Arif. 2014. *Pengaruh DAU, PAD, SiLPA, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2013*. Jurnal Akuntansi. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Republik *Indonesia*, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Sularno, Fitria. 2013. *Pengaruh PE, PAD, Dan DAU Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*. Skripsi. Universitas Widyatama.
- Syafitri, Irma. 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Dan DAU Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Wandira, Arbie. 2012. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Belanja Modal*. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Semarang.